

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Komitmen hidup berbangsa dan bernegara dalam naungan Pancasila menjadi pilihan segenap rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan kehidupannya, yaitu mencapai konsepsi masyarakat madani-Pancasila. Komitmen tersebut dibangun dalam pijakan struktur ideologis yang kokoh, dapat ditemukan secara histori serta dijaga melalui identitas kebudayaan yang ada hingga didukung melalui berbagai kegiatan politik oleh segenap warga negara Indonesia. Hanya saja, dalam perkembangannya, proses untuk membangun dan memperkuat komitmen warga negara muda saat ini mengalami tantangan yang begitu besar. Salah satu tantangan tersebut terkait dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini, yang memberi dampak pada dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi mampu mendorong penguatan komitmen bernegara melalui interaksi, pertukaran pikiran, munculnya saran serta kritik tanpa dibatasi ruang serta waktu dalam rangka pembangunan kesepahaman bersama tentang cara bernegara berdasarkan Pancasila. Konteks tersebut merepresentasikan bentuk demokrasi deliberatif, dimana setiap permasalahan yang terjadi mampu diselesaikan melalui jalur musyawarah dengan cara dialogis (Habermas, 1991). Partisipasi yang dibangun oleh setiap warga negara, memastikan bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan bagi perbaikan Masyarakat (Suryadi, 2010, hlm. 30).

Namun, pada sisi lainnya, kondisi demikian berpotensi melemahkan komitmen dan kesepahaman dalam bernegara. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi jembatan baru bagi kemunculan berbagai jenis faham radikal-terorisme yang mengganggu ketentraman serta keamanan bangsa dalam beberapa dekade terakhir (Eatwell & Goodwin, 2010, hlm. 199) terutama pada generasi muda (Awan & Whiting, 2019, hlm.32). Selain itu, dapat mengancam kedaulatan dan menimbulkan kerentanan terhadap munculnya pemberontakan melalui pelepasan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia menuju nilai-nilai radikal-terorisme. Beberapa fakta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama, Survey Alvara*

*Research Center* tahun 2017 menunjukkan tren sikap intoleran dan radikal dalam komunitas-komunitas mahasiswa/i. Terungkap 23,4% mahasiswa mendukung Indonesia menjadi negara Islam di bawah kepemimpinan seorang Khilafah, bahkan 23,5% setuju dengan gerakan ISIS (Rahma, A., 2018, hlm.7). *Kedua*, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan Badan Intelijen Negara (BIN) tahun 2017 terkait penyebaran radikalisme pada sejumlah kampus di 15 Provinsi yang ada di Indonesia. Hasilnya membuktikan bahwa; 1) terdapat 3 Perguruan Tinggi yang posisinya sudah menjadi tempat atau basis calon pelaku aksi teror yang berasal dari mahasiswa, 2) terdapat setidaknya 39% mahasiswa dengan latar belakang Perguruan Tinggi yang berbeda di Indonesia telah terpapar paham radikal ([www.lipi.go.id](http://www.lipi.go.id), 2018). Hal tersebut senada dengan temuan BNPT yang menyatakan bahwa hampir seluruh PTN di Indonesia telah terpapar radikalisme, 7 diantaranya adalah Perguruan Tinggi terbesar di Indonesia (<http://nasional.sindonews.com>, 2018).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Mun'im Sirry dkk pada tahun 2018 terkait gambaran umum radikalisasi mahasiswa/I pada 7 kampus negeri yang teridentifikasi terpapar radikalisme oleh BNPT, yaitu IPB di Bogor (Jawa Barat), ITS di Surabaya (Jawa Timur), UI di Depok (Jawa Barat), UNAIR di Surabaya (Jawa Timur), UNDIP di Semarang (Jawa Tengah), UB di Malang (Jawa Timur). Berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa 30,4% mahasiswa mengaku pernah terlibat bahkan masih aktif dalam jaringan kelompok radikal. Sementara 29,7% mahasiswa menjawab pernah terlibat dengan jaringan kelompok radikal tapi sudah tidak aktif lagi, dan sisanya 39,9% mahasiswa menyatakan bahwa tidak pernah mengikuti dan tidak tertarik jaringan kelompok radikal. Lebih lanjut dapat diketahui faktor utama yang mendorong mahasiswa sehingga berubah radikal datang dari rekan / teman mereka (48,3%), mentor senior (8,3%), dosen (1,3%) dan orang tua (1%). Terakhir yang penting dari hasil penelitian ini adalah terkait gambaran awal mula mengenal radikalisme yang didominasi oleh bacaan dari media sosial (53,4%), situs internet (49,3%), youtube (32,6%), brosur dan pamflet (25,1%), serta interaksi langsung pada forum pengajian (47,5%).

*Keempat*, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Bagong Suyanto et al., (2019, hlm.1), yang dipublikasikan dalam jurnal internasional *Studies in Conflict & Terrorism* dengan judul “*Pseudo-Radicalism and the De-Radicalization of Educated Youth in Indonesia*”. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlu kehati-hatian untuk mengklasifikasikan bentuk radikalisme di lingkup mahasiswa, karena memiliki perbedaan yang signifikan dengan karakteristik di luar (terafiliasi dengan jaringan radikal global). Oleh karenanya psedoradikalisme dipilih untuk menggambarkan kondisi radikalisme di kalangan mahasiswa. Selain itu, terdapat beragam cara mahasiswa untuk bertransisi atau bergabung pada pemikiran radikal. Dinamika perubahan tidak terjadi pada fase praradikalisme ke identifikasi diri tapi juga saat mahasiswa sudah menjadi atau terlibat dalam kelompok tersebut.

*Kelima*, hasil penelitian pendahulu yang dilaksanakan oleh peneliti pada tahun 2022, dilaksanakan dalam dua kali penelitian. pertama dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa yang berasal dari 4 (empat) kampus berbeda yaitu, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Palang Karaya, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Khairun Ternate. Kedua, melibatkan secara khusus mahasiswa UPI karena disesuaikan dengan kebutuhan riset pengembangan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat potensi radikalisme pemikiran di kalangan mahasiswa di empat kampus serta di UPI secara khusus. Temuan penelitian pertama menunjukkan potensi tersebut dilihat dari jumlah prosentase jawaban atas beberapa pernyataan berikut: 1) “Aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah sebuah hal yang wajar”, sejumlah 16.2% mahasiswa setuju dan sangat setuju dengan pernyataan tersebut; 2) pernyataan tentang “Keyakinan harus diperjuangkan meskipun lewat jalan kekerasan”, sekitar 19,2% mahasiswa 4 kampus pro atau mendukung pernyataan tersebut. Menariknya, 3) terdapat 23,4% mahasiswa pro terhadap pernyataan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini (dengan jumlah sangat setuju 7,2% dan 16,2% setuju). 4) Selain itu, 16.7% (terdiri dari 5,6% sangat setuju, dan 11.1% setuju) mahasiswa sepakat untuk menggantikan ideologi pancasila/sistem politik saat ini dengan dengan ideologi/sistem politik lainnya.

Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hasil penelitian yang secara khusus hanya melibatkan mahasiswa UPI, dengan penjabaran sebagai berikut; 1) “Aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah sebuah hal yang wajar”, sejumlah 12,7% mahasiswa setuju dengan pernyataan tersebut. 2) “Keyakinan harus diperjuangkan meskipun lewat jalan kekerasan”, sekitar 15,8% mahasiswa UPI pro terhadap pernyataan tersebut. 3) terdapat 19,6% mahasiswa yang setuju terhadap pernyataan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. 4) Selain itu, 13,1% mahasiswa setuju untuk menggantikan ideologi pancasila/sistem politik saat ini dengan dengan ideologi/sistem politik lainnya.

Selain beberapa fakta dalam negeri, hal serupa terjadi di beberapa negara lainnya. Seperti berdasarkan laporan untuk komisi Eropa yang menemukan bahwa Kampus pada dasarnya menjadi gerbang bagi gerakan radikalisme untuk dapat menarik orang ke dalam proses radikalisme. Hal ini diperkuat dengan banyaknya media Inggris yang memberi perhatian terhadap fakta bahwa sejumlah teroris telah dididik di Universitas Inggris (McGlynn & McDaid, 2019; Neumann, 2008) dan Universitas lainnya (Brown & Saeed, 2015, hlm.5).

Oleh karenanya, gerakan kontra radikal-terorisme pada generasi muda telah melanda banyak tempat didunia yang menempatkan sekolah dan universitas di garis depan kontra-terorisme global (Ghosh et al., 2016; Sjoen & Jore, 2019). Gerakan ini digunakan sebagai istilah umum yang menyatukan seluruh kebijakan dan tindakan untuk menangani radikalisme dan kekerasan ekstremisme (Kaishahauri, 2021, hlm. 19). Dalam narasi global, gerakan kontra radikal-terorisme dikenal dengan dua istilah, yaitu *Countering Violent Extremism (CVE)* dan *Preventing Violent Extremism (PVE)*. CVE hadir sebagai respon pertama untuk menghadapi maraknya aksi radikalisme pada awal tahun 2000-an. Dan menjadi sebuah narasi formal setelah Uni Eropa (UE) mencantumkan istilah tersebut dalam sumber resminya setelah serangan teroris Madrid 2004 dan London 2005 (Kaishahauri, 2021, hlm. 25). CVE menjadi strategi dengan konsep penggabungan strategi deradikalisme dan pelepasan moral yang dapat memfasilitasi serta membuka jalan bagi individu untuk melalui proses tersebut, sehingga dapat menarik kembali

pandangan dunia mereka dari organisasi ekstremis (Koehler & Fiebig, 2019, hlm. 45)

Sedangkan *Preventing Violent Extremism (PVE)* menarasikan pada konteks yang berbeda dari CVE. “*Preventing*” dan “*Countering*”, sebagai dua istilah yang berbeda. Pencegahan mengarahkan pada penghindaran sesuatu agar tidak terjadi, sedangkan melawan mengindikasikan reaksi atau tanggapan terhadap beberapa peristiwa atau sebuah fenomena yang ada. PVE mendapatkan perhatian lebih besar di tingkat internasional, nasional dan lokal (Busher, Choudhury & Thomas, P, 2019, hlm.1) pada tahun 2015, ketika Rencana PBB *Action to Prevent Violent Extremism* memerintahkan negara-negara Anggota untuk mengembangkan rencana aksi dalam tindakan/proses radikalisasi. Terdapat tujuh bidang yang menjadi fokus utama PVE, yaitu 1) dialog dan pencegahan konflik, 2) penguatan pemerintahan yang baik, HAM dan supremasi hukum; 3) pelibatan masyarakat, 4) Memberdayakan pemuda, 5) Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Perempuan, 6) Pendidikan, pengembangan keterampilan dan fasilitasi pekerjaan; 7) komunikasi strategis, internet dan media sosial (PBB, 2015, hlm. 14). Dari ketujuh fokus utama tersebut, Pendidikan menjadi salah satu bidang yang menonjol dilaksanakan di banyak negara (Aly et al., 2014; O.S.C.E., 2018).

Pendidikan memiliki keunggulan karena didisain serta dikondisikan dalam situasi tertentu melalui pendekatan simultan serta melalui pendekatan yang komprehensif (Pettinger, 2017, hlm. 1). Pada dasarnya pendidikan tidak dapat mencegah seseorang melakukan tindakan kekerasan atas nama ideologi ekstremis tetapi penyediaan pendidikan yang relevan dengan kualitas yang baik dapat membantu menciptakan kondisi yang mempersulit ideologi dan kekerasan untuk berkembang biak. Lebih khusus kebijakan Pendidikan dapat memastikan bahwa tempat belajar tidak menjadi tempat berkembang biaknya ekstrimisme kekerasan. Juga harus mampu memastikan bahwa konten atau materi Pendidikan dan pendekatan pengajaran serta pembelajaran benar-benar mampu mengembangkan resiliensi (ketahanan) peserta didik terhadap ekstrimisme kekerasan.

Oleh karena itu peran utama Pendidikan bukanlah mencegah ekstrimisme kekerasan atau mengidentifikasi individu yang berpotensi menjadi ekstrimis

kekerasan, lebih utama daripada itu adalah menciptakan suasana dan kondisi yang membangun pertahanan atau resiliensi dalam diri mahasiswa untuk melawan faham atau kekerasan ekstrimis dan memperkuat komitmen kebangsaan mereka terhadap nilai-nilai antiradikalisme serta memperkuat komitmen warga negara muda terhadap nilai serta prinsip fundamental bangsa (UNESCO, 2017, hlm. 22).

Dalam tataran pedagogis pembelajaran yang harus dikembangkan adalah pembelajaran yang tidak hanya mengutamakan keterampilan kognitif tetapi juga keterampilan sosio emosional dan perilaku peserta didik dalam rangka menumbuhkan rasa hormat terhadap keragaman dan keterlibatan yang bertanggung jawab. Dominasi intervensi Pendidikan dalam gerakan kontra-radikalisme dilaksanakan melalui pengajaran mata pelajaran yang mempromosikan toleransi, pemahaman dan Pendidikan Kewarganegaraan (Aly et al., 2014; Davies, 2009). Lebih lanjut UNESCO (2017, hlm. 12) menguatkan pernyataan tersebut, bahwa Pendidikan dapat membangun ketangguhan kaum muda terhadap pesan ekstrimis kekerasan dan menumbuhkan rasa identitas dan kepemilikan yang positif hal tersebut dilakukan dalam kerangka Pendidikan kewarganegaraan global.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai *conservation education, social and moral development dan socio-civic development* dalam membina dan mengembangkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa untuk dapat meminimalisir berbagai ancaman, tantangan, serta hambatan untuk negara Indonesia (Winataputra, 2016). Lebih lanjut, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat memfasilitasi berkembangnya *resiliensi* (ketahanan diri) mahasiswa terhadap radikalisme dengan menyediakan ruang atau lingkungan yang aman, nyaman untuk bisa memperdebatkan isu-isu kontroversial dan membantu mereka memahami bagaimana mereka dapat mempengaruhi dan beradaptasi dalam mengambil keputusan. Pendidikan Kewarganegaraan dapat mendorong resiliensi siswa terhadap serangan pemikiran yang eksklusif serta narasi adu domba satu kelompok dengan kelompok lainnya UNESCO (Aly et al., 2014, hlm.371). Karena saat pendidikan tidak membekali peserta didik melalui pembelajaran yang relevan termasuk di dalamnya kesempatan dalam menentukan masa depan mereka dan belajar tentang isu-isu kontroversial termasuk permasalahan radikalisme yang ada

pada level lokal dan global, kemungkinan besar mahasiswa akan mencari jawaban dari sumber informasi yang belum tentu dan memungkinkan di manipulasi oleh perekrut ekstrimisme kekerasan.

Berdasarkan pemaparan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis serta mendapat perhatian besar melalui fungsi serta peran yang dimiliki, yaitu sebagai Pendidikan nilai dan moral sekaligus menjadi media Pendidikan demokrasi. Dalam menjalankan kehidupan demokratis perlu adanya dukungan dari berbagai lingkungan khususnya lingkungan belajar yang terjadi di kelas Pendidikan kewarganegaraan sebagai representasi laboratorium demokrasi. Komitmen serta ketangguhan sebuah sistem yang telah disepakati sebuah masyarakat menjadi prasyarat akan kekokohan sebuah bangsa. Oleh karena itu pengelolaan pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan diupayakan untuk penguatan serta pembentukan kecerdasan individu dalam ruang demokrasi yang tercermin dari wawasan, sikap serta partisipasi dalam proses pembelajaran tersebut. Pengembangan kemampuan berfikir-analitis kritis dalam pembelajarn Pendidikan Kewarganegaraan memungkinkan warga negara muda untuk menolak narasi ekstremis atas dasar penolakan rasional terhadap ide-ide tersebut, yang didasarkan pada keinsyafan diri sebagai bagian dari sebuah bangsa dan negara yang memiliki atribut kewarganegaraan yang bersifat unik karena sesuai dengan ideologi dan konstitusi setiap negara.

Ketersediaan ruang diskusi atas isu-isu kontroversial dalam proses pembelajaran PKn, menghantarkan individu terhadap kesadaran tentang hakikat diri dan lingkungan, berdampak pada pelemahan kekuatan ide-ide ekstemis dengan membuka dan melebarkan ruang bagi peserta didik untuk membuka dan mengembangkan argumetasi mereka. Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru, memiliki peran sentral dalam pengembangan watak kewarganegaraan kaum muda melalui penguatan konsep yang berorientasi pada tuntutan nilai – nilai dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat dan bermuara pada aplikasi nilai-nilai moral serta keyakinan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahab, 1999, hlm.13) serta dibangun dengan tujuan merangsang berkembangnya partisipasi aktif dari warga negara pada masyarakat

civil (*civil society*) dan kemampuan mengambil keputusan politik yang cerdas dalam sistem demokrasi, menjadi modal utama untuk mewujudkan kehidupan yang berbudaya dan beradab (Veldhuis, 1997, hlm. 8).

Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang berperan strategis, karena proses pembelajaran yang dilaksanakan mampu membangun kemampuan kritis serta rasional dalam menerima pemikiran–pemikiran luar yang tidak relevan dengan ruh nilai–nilai serta norma luhur bangsa Indonesia, serta mencegah terjadinya pelepasan moral individu pada paham ekstrimisme (Aly et al., 2014, hlm. 370). Paradigma nilai yang dibangun dalam pembelajaran tersebut, dilakukan melalui alur pemikiran esensialisme, perenialisme, konstruktifisme dan progresifisme (Somantri & Winataputra, 2010: hlm. 125) serta menggunakan pendekatan *pedagogic humanistic, relasional dan inklusif* (Sjoen & Jore, 2019, hlm. 269) serta *inquiry approach*, menjadi salah satu titik tumpu utama dalam gerakan counter radikalisme pada mahasiswa di lingkungan kampus.

Robinson (1967 dalam Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 312) mengidentifikasi tujuan *civic education* yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan kewarganegaraan saat ini, yaitu:

1. *Knowledge and skill to assist in solving the problem of our times.*
2. *Awareness of the effects of science on civilization and its use to improve the quality of life.*
3. *Readiness for effective economic life.*
4. *Ability to make value judgement for effective life in a changing world*
5. *Recognition that we live in an open-ended world which requires receptivity to new facts, new ideas, and new ways of life.*
6. *Participation in the process of decision-making through expression of view to representative, expert and specialists*
7. *Belief in both liberty for the individual and equality for all, as guaranteed by the constitution of the United States*
8. *Pride in the achievements of the US, appreciation of the contribution of other peoples, and support for international peace and cooperation.*
9. *Use of the creative art to sensitize oneself to universal human experience and to the uniqueness of the individual*
10. *Compassion and sensitivity for the needs, feelings, and aspirations of other human beings.*
11. *Development of democratic principles and application to daily life.*



Berdasarkan identifikasi yang seksama, rumusan tujuan yang cukup rinci tersebut hakikatnya mengarahkan warga negara pada tantangan kehidupan yang lebih dinamis yaitu tantangan pada Era Globalisasi. Warga negara yang diharapkan ialah warga negara yang memiliki kapasitas berfikir analitis (*analytical citizenry*), warga negara yang cerdas (*an informed citizenry*), dan warga negara yang memiliki komitmen dan mampu melibatkan diri (*a committed and involved citizenry*) dalam berbagai level kehidupan baik kehidupan bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara serta Pergaulan internasional.

Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu memfasilitasi pembentukan kepribadian individu menjadi lebih baik serta berkarakter, memiliki nilai serta norma yang kokoh berdasarkan identitas kebangsaan yang dibangun sehingga menjadi sebuah dasar serta fondasi yang kokoh bagi pembentukan keterlibatan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada, salah satunya permasalahan terkait radikalisme-teorisme. Berdasarkan hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan harus memberi dampak serta kontribusi positif terhadap pengembangan wawasan, internalisasi nilai-nilai serta prinsip fundamental bangsa hingga partisipasi melalui pelibatan warga negara muda (mahasiswa) dalam berbagai permasalahan yang ditemukan pada berbagai lingkungan, baik keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Sehingga Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam narasi untuk meningkatkan resiliensi atau ketahanan mahasiswa terhadap berbagai paham radikal yang dapat mengancam pelepasan moral pada nilai-nilai baru yang lebih ekstrim yang melahirkan sebuah ancaman terhadap munculnya pemberontakan dan disintegrasi bangsa.

Hanya saja pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam narasi melawan radikal-terorisme yang bersifat komprehensif (mampu manjangkau tiga kompetensi warga negara, yaitu pengetahuan, penguatan nilai-nilai moral, hingga keterampilan sosial) melalui pelibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, tidak dapat berjalan efektif apabila tidak terdapat dukungan melalui optimalisasi pendekatan, model, metode, sistem lingkungan serta perangkat pembelajaran yang memungkinkan kondisi pembelajaran yang nyaman serta kondusif. Sebuah kritikan terhadap implementasi Pendidikan Kewarganegaraan saat

ini, bahwa pembelajaran tersebut dilakukan dengan metode/model yang masih menempatkan peserta didik sebagai organisme pasif serta bersifat *teacher center*. Padahal, sejatinya proses pembelajaran PKn dalam kerangka kontra radikal-terorisme memainkan peran strategis dalam tiga hal utama, yaitu: *pertama*, Pencapaian kompetensi pengetahuan diarahkan pada penguatan kemampuan berfikir kritis analitis melalui dialog terbuka terkait isu kontroversial (khususnya radikal-teorisme), sehingga dapat melemahkan kekuatan ide-ide ekstrim. *Kedua*, *penguatan* kompetensi nilai melalui pendekatan Pendidikan moral diarahkan untuk pencegahan terjadinya pelepasan moral dan penerimaan terhadap nilai ekstrim dalam diri individu. Serta *ketiga*, keterampilan diarahkan pada berkembangnya partisipasi aktif warga negara muda untuk menjadi bagian dalam menemukan berbagai alternatif solusi serta menjadi pemeran utama dalam aksi kontra radikal-terorisme yang dijalankan baik pada tataran lokal, nasional maupun internasional.

Sejatinya Pendidikan Kewarganegaraan mampu mengembangkan kompetensi yang mendorong pembentukan karakter peserta didik. Karakter berdasarkan pada identitas sosial bangsa Indonesia, yang menjadikan individu sadar akan hakikat diri sebagai makhluk Tuhan, individu serta sosial (dalam konteks negara yang plural). Dalam pandangan Syvertsen, Constance & Michael (2007) terdapat 3 kompetensi kewarganegaraan yang dapat mengarahkan pada pembentukan nilai serta karakter peserta didik, yaitu: (1) kemampuan kewarganegaraan meliputi kemampuan berkomunikasi, bermufakat, analisis kritis terhadap informasi politik, (2) keterlibatan kewarganegaraan melalui simulasi Pemilu serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan komunitas, (3) kesadaran akan isu dan konsep kewarganegaraan (isu lokal, isu nasional, isu internasional, persaingan dan peristiwa nasional yang sedang terjadi).

Beberapa kendala implementatif Pendidikan Kewarganegaraan di lapangan telah dikupas dari berbagai perspektif ahli serta dukungan riset. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat rentan terhadap bias politik praktis penguasa sehingga cenderung lebih merupakan instrumen penguasa daripada sebagai wahana pembentukan watak bangsa (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 43). Selain itu, terdapat dominasi ceramah dalam proses pembelajaran, pengisian tugas buku paket dan

adanya keterikatan dengan ruang kelas tertentu (Oyetade & Oladiran, 2012, hlm. 150). Dalam implementasinya, PKn lebih menekankan pada penguasaan materi pelajaran, maka pengembangan sikap dan keterampilan untuk pembentukan karakter peserta didik belum mendapat perhatian yang cukup sebagaimana mestinya (Komalasari & Rahmat, 2019, hlm. 114). Hal ini diperkuat dengan adanya hasil riset di Keer (1999, hlm. 13) yang menempatkan PKn di wilayah Asia (termasuk Indonesia) berada pada kontinum minimum, dengan indikator “ *thin, exclusive, elitist, civic education, formal content led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*” yang maknanya ialah Pendidikan Kewarganegaraan hanya dimaknai secara sempit, menerima aspirasi tertentu, pengajaran kewarganegaraan semata, formal, berpatokan pada isi, orientasi pada pencapaian pengetahuan, dan hasilnya sangat mudah untuk diukur. Selain itu, proses pembelajaran yang dibangun serta sistem penilaian PKn lebih menekankan dampak instruksional (*instructional effect*), dan berpusat pada pencapaian ranah kognitif saja, sedangkan pengembangan pada dimensi lainnya belum diperhatikan (Budimansyah. D, 2007, hlm. 118).

Gambaran proses pembelajaran tersebut, belum mampu mengajak peserta didik untuk berfikir secara kritis, kreatif serta menjadi bagian yang memberi solusi atas permasalahan yang ada saat ini, menjadi salah satu alasan lahirnya generasi muda yang menolak perbedaan sebagai sebuah anugerah Tuhan, apatis terhadap kegiatan kewarganegaraan dan bilapun diterima, hanya difahami secara dangkal tanpa mampu menjelaskan tentang hakikat diri dan orang lain dalam kesamaan serta sebuah kesederajatan sebagai manusia (Koten, 2012, hlm. 7) dalam konteks sosial terkait hubungan warga negara dengan negaranya. Pada konteks tersebut, Pendidikan kewarganegaraan masih terjebak dalam kondisi *knowledge based* atau berpusat pada pengembangan pengetahuan saja yang secara esensial berkebalikan dengan tugas utama Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang berbasis nilai atau sebagai Pendidikan karakter yang syarat dengan pembelajaran nilai atau *value based*.

Oleh karena itu, inovasi pembelajaran PKn harus selalu dilakukan oleh seluruh praktisi Pendidikan khususnya pengajar (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 332).

Hal utama yang dilakukan adalah terkait pergeseran paradigma dalam pendekatan Pembelajaran PKn yang awalnya berorientasi tujuan dan isi (*content based curriculum*) ke arah yang lebih menekankan proses (*process based curriculum*) bahkan saat ini diarahkan pada inovasi pendekatan berorientasi pada kompetensi (*competency based curriculum*) (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 333). Penekanan pada pencapaian kompetensi memberikan peluang lebih besar dibandingkan terhadap hasil. Dengan demikian pendekatan-pendekatan yang seharusnya digunakan dalam proses pembelajaran PKn adalah pendekatan yang memberikan dominasi otonomi kepada guru/pengajar dalam kerangka otonomi Pendidikan dalam setiap jenjang Pendidikan.

Langkah strategis lainnya ialah menciptakan situasi dan kondisi yang dapat membangun pengetahuan, internalisasi nilai-nilai fundamental bangsa serta pelibatan warga negara muda dilakukan melalui interaksi edukasi didalam kelas dengan suasana dialogis yang konstruktif, yang interaktif dan reflektif antara pengajar dan siswa. Maknanya arah pendekatan yang dilakukan lebih mengarah pada pengembangan pendekatan *field psychology* yang sejalan dengan pandangan John Dewey karena menekankan pada pembelajaran yang mendorong siswa dalam proses konseptualisasi dan pemecahan masalah (Metcalf & Hunt, 1995, hlm.3). Nu'man Somantri (2001) mengemukakan kontribusi dari aliran *field psychology* terhadap pengembangan pembelajaran PKn yaitu : mendorong partisipasi aktif siswa, memiliki sifat inkuiri dan mendorong siswa untuk memecahkan masalah..

Selain penentuan pendekatan pembelajaran, juga penting untuk mengembangkan model pembelajaran yang mendukung pendekatan yang mengarahkan pembentukan warga negara yang baik melalui cara yang demokratis, interaktif, sehingga tidak terjadi perasaan tertekan atau keterpaksaan pada diri siswa dalam proses internalisasi dan personalisasi nilai nilai ke dalam individu (Wahab & Sapriya, 2011, hlm. 335). Beberapa alasan urgensi dari pengembangan model dalam Pembelajaran PKn adalah: 1). model pembelajaran yang efektif dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah, 2) model pembelajaran memberikan informasi serta membangun Hasrat belajar peserta didik yang lebih baik, menghindari rasa bosan dan akan berdampak pada minat serta

motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. 3) model menjadi sebuah kerangka kunci dari penerapan sebuah pendekatan, prosedur, strategi, metode, dan teknik pelajaran dari mulai perencanaan sampai akhir pembelajaran (Asyafah, 2019, hlm. 22). Maknanya bahwa dalam mengimplementasikan paradigma pendekatan pembelajaran Pendidikan dengan paradigma baru harus di desain melalui kerangka yang kokoh dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi melalui optimalisasi komponen pembelajaran seperti metode media materi sumber ajar hingga evaluasi (M3SE). Ke semua komponen itu tercantum dalam konsep model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Dalam hal ini pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada peningkatan wawasan, nilai-nilai serta prinsip fundamental bangsa serta partisipasi melalui pelibatan mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan untuk meningkatkan resiliensi (ketahanan) individu/mahasiswa terhadap paparan radikalisme-ekstrimisme.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertantang untuk melakukan pengembangan model pembelajaran yang dapat memaksimalkan proses dan pencapaian tujuan pencapaian pengetahuan, nilai dan keterampilan warga negara muda untuk membangun resiliensi serta komitmen warga negara muda terhadap radikalisme di lingkungan kampus. Melalui pengembangan pembelajaran model Project Nilai Antiradikalisme yang mengkombinasikan strategi pembelajaran project dan Pendekatan nilai, mahasiswa akan diarahkan untuk memiliki kemampuan berfikir-kritis analitis yang memungkinkan warga negara muda untuk menolak narasi ekstremis atas dasar penolakan rasional terhadap ide-ide tersebut. Mengokohkan penolakan akan pelepasan moral pada nilai baru yang bersifat ekstrimis serta menjadi bagian dari warga negara partisipatif untuk menjadi bagian dari solusi gerakan kontra radikalisme- terorisme lokal, nasional dan internasional.

Hal tersebut senada dengan hasil riset (Sprote, 2008, hlm. 202) yang menyatakan bahwa pengalaman yang berfokus pada hal yang terkait dengan kehidupan bernegara, seperti pembahasan tentang isu terkini, diskusi masalah dalam komunitas/masyarakat tertentu, serta memberikan siswa ruang kelas yang

bersifat dialogis terbuka sangat efektif untuk menumbuhkan komitmen kewarganegaraan.

Pembelajaran PKn menggunakan *project menjadi* model pembelajaran kewarganegaraan yang memberi tekanan pada orientasi berpikir kritis dan pemecahan masalah. *Project citizen* memberi ruang kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan kreatif sehingga meningkatkan minat siswa terhadap PKn, karena *project citizen* memberi pengalaman kepada siswa untuk membentuk identitas mereka sendiri dan membina hubungan mereka dengan Masyarakat (Budimansyah, 2008, hlm. 183). Dalam kerangka pembelajaran Indonesia, pembelajaran project mampu menjadi media dalam mentransformasikan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila kepada generasi muda agar memiliki wawasan global (Dahliyana, 2023, hlm. 34). Dalam prosesnya, peserta didik diajak untuk memahami konsepsi diri secara kritis dalam ruang diskusi terbuka tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, tentang kondisi alamiah serta sosiologis-spiritual bangsa dan negara yang tumbuh dalam perbedaan. Proses pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang terbuka, menstimulus keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran akan memunculkan komitmen dari peserta didik (Campbell & Connolly, 2008; Hart et al., 2007).

Selain itu, pendekatan nilai dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain. Memastikan tidak terjadinya pelepasan moral individu dari nilai-nilai utama kepada nilai-nilai yang diajarkan kaum radikal-terorisme. Karena apapun yang terjadi di ruang kelas dapat memberi dampak signifikan pada komitmen siswa terhadap partisipasi kewarganegaraan (Sprote, 2008, hlm. 201).

Berdasarkan kondisi serta permasalahan yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : “Pengembangan Model Pembelajaran Project Nilai Antiradikalisme untuk Mengokohkan Komitmen Warga Negara Muda“

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

Bertolak dari masalah, data dan fakta, serta hasil penelitian terdahulu, peneliti mengidentifikasi masalah yang mendasari penelitian ini. Pertama, semakin merebaknya penyebaran radikalisme pada generasi muda di lingkungan perguruan tinggi; kedua, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi masih didominasi penyeragaman tanpa menginternalisasi esensi diri dan lingkungan dalam kerangka keberagaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan; Pendidikan Kewarganegaraan disampaikan melalui dominasi pada penguasaan aspek kognitif; keempat, belum adanya model pembelajaran khusus yang mengajarkan serta menanamkan tentang nilai-nilai antiradikalisme di perguruan tinggi dalam mengokohkan komitmen warga negara muda.

Berdasarkan pada identifikasi tersebut, permasalahan umum yang diangkat dalam penelitian adalah bagaimana “Pengembangan Model Pembelajaran Project Nilai Antiradikalisme untuk Mengokohkan Komitmen Warga Negara Muda?” agar permasalahan tersebut lebih rinci, peneliti membagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pembelajaran antiradikalisme dalam PKn serta komitmen warga negara muda di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Bagaimana pengembangan model pembelajaran project nilai antiradikalisme dalam PKn untuk mengokohkan komitmen warga negara muda di UPI?
3. Bagaimana Efektifitas model pembelajaran project nilai antiradikalisme dalam mengokohkan komitmen warga negara muda di UPI?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara general, penelitian ini memiliki tujuan dalam mengembangkan Model Pembelajaran Project Nilai Antiradikalisme untuk Mengokohkan Komitmen Warga Negara Muda.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Berdasarkan rumusan tujuan umum tersebut, secara khusus penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis gambaran pembelajaran antiradikalisme dalam pembelajaran PKn dan Komitmen warga negara muda di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Mengembangkan, mengimplementasikan serta menguji Model pembelajaran project nilai antiradikalisme dalam PKn untuk mengokohkan komitmen warga negara muda di UPI.
3. Menganalisis Efektifitas implementasi model pembelajaran project nilai antiradikalisme dalam mengokohkan komitmen warga negara muda di UPI.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Segi Teori**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kerangka keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan melalui pengembangan model pembelajaran antiradikalisme untuk mengokohkan komitmen warga negara muda. Melalui penguatan resiliensi individu serta peningkatan keterkaitan emosional mahasiswa secara imajinatif terhadap negara sehingga mampu mengokohkan komitmen warga negara muda.

### **1.4.2 Segi Kebijakan**

Penelitian ini dapat menjadi masukan alternatif model pembelajaran yang memfokuskan pada penanaman nilai-nilai anti radikalisme pada tataran Pendidikan formal bagi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, dapat memberi masukan bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam implementasi "*prevent violent extrimist*" atau kebijakan pencegahan kekerasan ekstrimis radikal-terorisem dalam lingkungan Pendidikan formal.

### **1.4.3 Segi Praktik**

Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai rujukan alternatif model pembelajaran PKn dalam menghalau serta meminimalisir faham-faham radikal di lingkungan Pendidikan formal (SD, SMP, SMA hingga



Perguruan Tinggi). Menjadi rujukan dalam meningkatkan komitmen warga negara muda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial**

Dalam penelitian ini, dibahas permasalahan berkaitan dengan salah satu isu sentral bangsa saat ini, dimanan semakin merebaknya paham radikalisme yang mengarah pada teorisme. Sehingga munculnya model pembelajaran yang fokus pada penanaman nilai-nilai antiradikalisme dengan basis nilai kultural- spiritual dapat mengokohkan komitmen warga negara muda saat ini di lingkungan Perguruan Tinggi.

#### **1.5 Struktur Organisasi Disertasi**

Pada bagian ini dijelaskan terkait struktur organisasi penelitian melalui cara sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian terkait pengembangan model pembelajaran project nilai antiradikalisme dalam mengokohkan komitmen warga negara muda. Secara sistematis, dijabarkan dalam lima bab. Setiap babnya memuat inti pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama Pendahuluan yang terdiri dari pendahuluan penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta struktur organisasi disertasi: narasi utama yang dibangun dalam latar belakang penelitian ini diawali dengan gambaran permasalahan (dalam data dan fakta), gap penelitian serta novelty yang dikembangkan dalam penelitian ini. Rumusan masalah disajikan untuk mengarahkan pada apa yang secara esensial akan diteliti serta di kaji secara komprehensif dalam disertasi ini. Tujuan dan manfaat penelitian diangkat untuk memastikan tujuan akhir dari riset serta manfaatnya bagi beberapa kalangan.
2. Bab dua berisi gambaran *state of the art* yang digunakan sebagai pisau analisis bagi peneliti dalam mengupas serta membahas pertanyaan utama dalam disertasi ini. Teori dan pandangan ahli yang digunakan adalah teori yang paling relevan dengan kajian disertasi yaitu terkait radikalisme, model pembelajaran, internalisasi nilai-nilai dalam individu, project citizen serta pembelajaran nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu dalam bab ini juga dituliskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan disertasi. Melalui gambaran

penelitian terdahulu, peneliti dapat melihat perkembangan arah riset radikalisme serta posisi inovasi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Selain itu ada pula kerangka berfikir dan hipotesa penelitian. Kerangka berfikir ini memandu peneliti terkait kerangka utama penelitian yang dikembangkan. Sedangkan hipotesis diterakan karena dalam implementasi riset ini, khususnya pada rumusan masalah tiga menguji efektifitas model yang dikembangkan terhadap peningkatan komitmen warga negara muda.

3. Bab Tiga berisi tentang gambaran metode penelitian yang digunakan peneliti untuk mengembangkan disertasi ini. Beberapa hal utama yang dibahas dalam bab ini adalah disain penelitian, prosedur penelitian, populasi, partisipan penelitian, kisi-kisi instrument, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab Empat berisi dua hal utama, yaitu temuan dan pembahasan penelitian. Temuan menjabarkan gambaran temuan riset yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan pembahasan menjadi bagian penting lainnya dalam disertasi ini, memuat gambaran hasil analisis dari temuan, pandangan dan teori dalam menjawab ketiga rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.
5. Bab Lima bersisi Kesimpulan yang memuat Kesimpulan Umum, Kesimpulan Khusus, Implikasi dan Rekomendasi. Kesimpulan umum merepresentasikan gambaran umum hasil penelitian, kemudian dijabarkan lebih rinci dalam simpulan khusus. Rekomendasi diangkat dengan tujuan agar penelitian ini mampu berkontribusi kepada beberapa pihak terkait.